

SIARAN PERS

DPR Desak Kirim Delegasi Parlemen Negara-negara OKI ke Yerusalem dan Xinjiang

Ouagadougou, 30/1/2020 – Delegasi DPR mendesak Parliamentary Union of The OIC Member States (PUIC/Persatuan Parlemen Negara-negara OKI) pertimbangkan pengiriman Delegasi PUIC ke Al Aqsa di Yerusalem dan Xinjiang untuk melihat langsung situasi faktual. Demikian disampaikan Mardani Ali Sera di sidang Komisi Budaya, Hukum, Peradaban dan Agama PUIC yang dihelat dari 27-30 Januari 2020 di Ouagadougou, ibu kota Burkina Faso.

Usulan politisi PKS itu menyeruak ketika forum berdebat mengenai perlu atau tidaknya sebuah resolusi khusus untuk menyikapi situasi di Uyghur. “Delegasi Indonesia mengusulkan agar PUIC mengirimkan Delegasi untuk secara langsung meninjau kondisi Komunitas Muslim Uyghur di Xinjiang guna mendapatkan informasi dan mengumpulkan fakta-fakta dari lapangan. Dengan demikian PUIC bisa mendapatkan gambaran sesungguhnya, sehingga langkah PUIC ke depan dalam menyikapi situasi di Xinjiang bisa lebih tepat,” tegas legislator dari daerah pemilihan Jakarta I itu.

Selain kunjungan ke Xinjiang, sambung Mardani, PUIC juga diminta mengirimkan Delegasi untuk meninjau situasi di Al Aqsa secara langsung. “Sebagai ibu kota abadi negara Palestina, kita juga harus tunjukkan dukungan kita terhadap Yerusalem termasuk Masjid Al Aqsa. Kunjungan Delegasi PUIC ke Yerusalem dan Al Aqsa akan memberikan dukungan kuat parlemen negara-negara Muslim terhadap masalah Palestina,” tegas anggota Komisi II DPR itu.

Saran yang disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR tersebut disetujui oleh seluruh peserta sidang. Usulan tersebut dinilai sangat diperlukan daripada memperdebatkan perlu atau tidaknya draf resolusi terkait Uyghur.

Untuk diketahui, Organisasi Parlemen Negara-negara Anggota OKI menghelat sidang tahunan yang ke-15 di Burkina Faso, 27-30 Januari 2020. Delegasi DPR ikut berpartisipasi di sidang tersebut yang dipimpin Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsudin.

Pada sidang tahunan tersebut dibahas berbagai permasalahan yang tengah dihadapi oleh Negara-negara Islam. Selain Mardani, anggota DPR Muslim dari Fraksi Demokrat tercatat sebagai anggota Komisi Budaya, Hukum, Peradaban dan Agama.